

Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Perusahaan Daerah Panca Karya Di Kota Ambon

Dynne Andriany
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon
andriandydne5@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the implementation of public sector accounting in the financial system at the Panca Karya Regional Company, Ambon City. This research focuses on the application of accounting standards, the challenges faced, and the impact on financial performance and corporate accountability. The method used is a qualitative method through structured interviews by using a questionnaire. This research shows that the Panca Karya regional company has good accountability because it uses external parties to check its financial reports even though there are challenges regarding HR competency, asset management, and information technology. Therefore, optimization efforts can be made through training or investment in technology so that regional companies can apply SAK ETAP properly and correctly in their financial reports to provide economic and non-financial information to necessary parties for decision-making.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan di Perusahaan Daerah Panca Karya Kota Ambon. Fokus penelitian ini mencakup penerapan standar akuntansi, tantangan yang dihadapi, serta dampak terhadap kinerja keuangan dan akuntabilitas perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan angket. Hasil dari penelitian ini adalah Perusahaan daerah Panca Karya memiliki akuntabilitas yang baik karena menggunakan pihak eksternal dalam memeriksa laporan keuangannya meskipun terdapat tantangan dalam hal kompetensi SDM, pengelolaan aset, dan teknologi informasi oleh karena itu upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui pelatihan atau investasi pada teknologi. sehingga perusahaan daerah dapat menerapkan SAK ETAP dengan baik dan benar pada laporan keuangannya sehingga dapat memberikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Sistem Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik adalah sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan oleh entitas pemerintah atau organisasi publik, tujuannya tidak hanya untuk mencatat arus dana, tetapi juga untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Yuesti dkk (2020) menekankan bahwa akuntansi sektor publik berperan penting dalam memberikan informasi terkait alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, sekaligus mendukung pembuatan keputusan yang efektif untuk pelayanan publik.

American Accounting Association (AAA) juga menekankan akuntabilitas dan pengendalian manajemen sebagai dua tujuan utama. Ini berarti bahwa informasi keuangan harus memungkinkan

pemantauan dan pelaporan yang jelas tentang penggunaan anggaran dan hasilnya. Selain itu, akuntansi sektor publik mencakup elemen seperti anggaran yang efisien, evaluasi investasi, dan pelaporan yang relevan bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, untuk memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dan transparan.

Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi swasta karena lebih berfokus pada pengelolaan dana publik demi kepentingan masyarakat dan pemenuhan tujuan sosial, bukan keuntungan finansial. Hal ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dan organisasi non-profit lainnya. Akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa

dana publik dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya akuntansi sektor publik, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan dalam pengelolaan SDM dan infrastruktur perlu diatasi untuk mencapai sistem keuangan publik yang optimal. Hasil penelitian Hendarianto dkk 2022 dengan judul implementasi pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah mengemukakan bahwa Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kecamatan Lembursitu Berpengaruh Signifikan.

Perusahaan Daerah Panca Karya sebagai entitas yang berkontribusi pada perekonomian lokal dimana perusahaan ini berdiri sejak tahun 1963, didalam perda Provinsi Maluku No 2 Tahun 2020 pasal 7 tentang kegiatan usaha dikatakan bahwa terdapat delapan bidang kegiatan pada PD.Panca Karya yakni kehutanan,perikanan,pertanian, jasa perbengkelan, pertambangan dan energi, pariwisata, jasa umum transportasi dan sub sektor perdagangan. Selama dirintis PD.Panca karya memiliki 6 bidang usaha yaitu transportasi, perbengkelan, kehutanan, pekerjaan umum, pertanian dan perikanan.

Dengan menjalankan beberapa bidang usaha PD.Panca Karya juga memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang diharapkan dapat mendatangkan pemasukan bagi perusahaan. Implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah atau lembaga publik oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi akuntansi sector publik pada PD Panca Karya melalui penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam sistem Keuangan Perusahaan Daerah Panca Karya di Kota Ambon”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas sektor publik, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan badan usaha milik negara.

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan adanya sistem

akuntansi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi keuangan pemerintah. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan negara.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan melalui akuntansi sektor publik harus akurat dan dapat dipercaya. Informasi ini penting tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga bagi pihak-pihak terkait, seperti investor, kreditor, dan lembaga pemantau. Laporan yang tepat waktu dan akurat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko keuangan. Melalui akuntansi sektor publik, pemerintah dapat mengukur kinerja mereka dalam pengelolaan keuangan. Ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi program-program yang telah diimplementasikan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik membantu pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.

American Accounting Association (AAA) menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dari berbagai informasi yang nantinya digunakan sebagai penilaian dan pengambilan keputusan yang berguna bagi yang akan menggunakan informasi tersebut.

Sementara yang kedua menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi adalah seni dalam mencatat, menghitung, dan meringkas secara tepat serta dinyatakan dalam bentuk satuan mata uang, terjadi proses transaksi dari berbagai kejadian yang bersifat finansial dan penafsiran hasilnya.

Menurut Mardiasmo (2018:14) akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Sedangkan menurut Halim (2014:18) Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa karakteristik utama akuntansi sektor publik yang membedakannya dari akuntansi sektor swasta meliputi:

1. Tujuan Publik: Akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk memenuhi

kepentingan masyarakat umum, bukan pemilik atau investor.

2. **Transparansi:** Pemerintah dan entitas sektor publik harus memenuhi prinsip transparansi dalam pelaporan keuangannya. Ini mencakup keterbukaan dalam penyediaan informasi keuangan kepada publik.
3. **Pengaturan dan Standar:** Akuntansi sektor publik sering kali diatur oleh aturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur, seperti International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).
4. **Keterbatasan Keuntungan Finansial:** Entitas sektor publik biasanya tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba, seperti yang sering terjadi dalam bisnis swasta.
5. **Sumber Dana yang Beragam:** Akuntansi sektor publik mengelola berbagai sumber dana, termasuk pajak, pinjaman, dan hibah.

Jenis akuntansi sektor publik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk:

1. **Akuntansi Pemerintah:** Ini berkaitan dengan akuntansi pemerintah pusat, yang melibatkan anggaran dan pelaporan keuangan entitas pemerintah nasional.
2. **Akuntansi Daerah dan Lokal:** Fokus pada akuntansi entitas pemerintah daerah, seperti pemerintah kabupaten, kota, dan desa.
3. **Akuntansi Lembaga Publik:** Terkait dengan akuntansi lembaga-lembaga publik, seperti universitas, rumah sakit, dan lembaga-lembaga penelitian yang dibiayai oleh pemerintah.
4. **Akuntansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN):** Melibatkan entitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah, yang memiliki tujuan ekonomi tetapi tetap dalam lingkup sektor publik.

Hubungan Pemerintah daerah dengan Perusahaan daerah atau BUMD dalam hal penyertaan modal dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah. Namun dalam pengelolaan merupakan entitas tersendiri dan berorientasi profit seperti halnya Perusahaan Daerah Pancakarya dimana perusahaan ini merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di sektor-sektor usaha yang dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan asli daerah, meliputi bidang kehutanan, perikanan, pertanian, jasa perbengkelan, pertambangan dan

energi, pariwisata, jasa umum transportasi dan sub sektor perdagangan..

Implementasi Akuntansi Sektor Publik

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu Implement. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.

Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. Menurut Nurman implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan Sudarsono menyatakan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (tools) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Implementasi akuntansi sektor publik melibatkan penerapan prinsip, standar, dan praktik akuntansi dalam organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan entitas publik lainnya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem yang dirancang untuk memberikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik untuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, maupun transparansi. Implementasinya mencakup:

1. **Penyusunan laporan keuangan:** seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional.
2. **Transparansi dan akuntabilitas:** Penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3. **Pengelolaan anggaran:** Menggunakan pendekatan berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Adapun laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan daerah atau BUMD meliputi:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas

5. Catatan atas laporan keuangan
6. Laporan realisasi anggaran (LRA)
7. Laporan perubahan SAL/SAK
8. Laporan operasional

Mahmudi (2016) menekankan pada penerapan akuntansi sektor publik berbasis kinerja. Menurutnya, implementasi akuntansi sektor publik harus mendukung pengelolaan keuangan negara yang:

1. Berorientasi hasil: Menghubungkan alokasi anggaran dengan pencapaian tujuan.
2. Mengutamakan transparansi: Penyajian informasi keuangan yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.
3. Meningkatkan akuntabilitas: Melalui audit dan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga terkait.

Sistem Keuangan

Abdul Kadir (2014) menyatakan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Romney (2015) menyatakan bahwa sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem keuangan adalah kumpulan lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, perusahaan non keuangan, dan rumah tangga yang saling berinteraksi untuk mendanai dan menyediakan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Peran utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana dari penabung ke pengguna dana untuk membeli barang dan jasa, serta untuk investasi. Dengan demikian, ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.

Sistem keuangan yang stabil diperlukan kerja sama antar komponen sistem keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial menjelaskan pengertian sistem keuangan sebagai berikut : “Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan, dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian. Sistem keuangan yang stabil diperlukan menjaga kestabilan setiap komponen dalam sistem keuangan. Komponen sistem keuangan di Indonesia terdiri dari:

1. Bank umum dan BPR
2. Industri keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, sekuritas, dan pegadaian

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana menurut (sugyono,2008) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yakni peneliti berperan sebagai instrument kunci.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan Perusahaan Daerah Panca Karya, termasuk analisis terhadap kesesuaian praktik dengan teori dan standar yang berlaku.

Objek penelitian adalah Perusahaan Daerah Panca Karya di Kota Ambon Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur Dilakukan dengan kepala SPI perusahaan daerah panca karya dengan menggunakan angket.

Analisa data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dimana data yang diolah berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitasnya, dalam penelitian ini data yang dipakai adalah hasil dari wawancara dengan kepala SPI PD Pancakarya yang dilakukan oleh peneliti, semakin lengkap penjelasan yang didapat maka akan semakin baik pula data yang dihasilkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi sektor publik adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang diterapkan oleh entitas pemerintah dan badan yang menggunakan dana publik. Tujuan utamanya adalah:

1. Akuntabilitas dan Transparansi Menjamin bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Mendorong penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Kepatuhan terhadap Regulasi Memastikan pengelolaan keuangan mengikuti peraturan yang berlaku, seperti SAP dan peraturan daerah.

PD Panca Karya, sebagai entitas publik, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan dengan standar akuntansi berbasis akrual.

Implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan PD Panca Karya melibatkan beberapa elemen penting:

1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Pendapatan dari aset daerah dan sewa diakui berdasarkan SAK ETAP berbasis akrual, yaitu pada saat hak atau kewajiban muncul, bukan hanya saat kas diterima. Penerimaan di muka, seperti sewa gedung, dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui secara bertahap.

2. Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Aset berupa gedung, lahan, dan fasilitas publik harus diukur dan dicatat dengan nilai wajar. Aset tetap memerlukan pencatatan dan penghapusan ketika sudah tidak memiliki manfaat ekonomi atau operasional. Liabilitas seperti pinjaman daerah atau kewajiban lain dicatat untuk mencerminkan posisi keuangan yang akurat.

Perusahaan Daerah Panca Karya di Kota Ambon telah mengadopsi sistem akuntansi sektor publik yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Dalam penerapannya, perusahaan ini menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam SAK ETAP serta keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar tersebut.

Pengendalian Internal dan Audit Keuangan dalam praktiknya pengendalian internal berfungsi untuk mencegah kesalahan atau kecurangan dalam transaksi keuangan. PD Panca Karya bekerja sama dengan auditor internal dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin transparansi laporan keuangan.

Tantangan Implementasi Akuntansi Sektor Publik di PD Panca Karya seperti :

1. Keterbatasan Kompetensi SDM

Pemahaman tentang SAK ETAP dan akuntansi berbasis akrual masih terbatas di kalangan karyawan. Diperlukan pelatihan berkelanjutan agar SDM mampu mengelola dan menyusun laporan keuangan dengan benar.

2. Kompleksitas Pengelolaan Aset

Aset daerah yang memiliki nilai besar dan beragam memerlukan prosedur pencatatan dan pemeliharaan yang rumit. Pengukuran nilai wajar aset terkadang membutuhkan penilaian eksternal.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Sistem informasi akuntansi yang tidak terintegrasi menyulitkan pencatatan dan konsolidasi laporan keuangan. Perlu investasi pada teknologi dan sistem yang mendukung akuntansi berbasis akrual.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan

Regulasi yang berubah-ubah memerlukan penyesuaian kebijakan dan prosedur keuangan.

5. .PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan PD Panca Karya di Kota Ambon merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan SAK ETAP berbasis akrual memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif. Meskipun terdapat tantangan dalam hal kompetensi SDM, pengelolaan aset, dan teknologi informasi, upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, investasi pada teknologi. Dengan implementasi yang tepat, PD Panca Karya diharapkan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon.

5.2. Saran

Perusahaan daerah Pancakarya dapat mengadakan pelatihan intensif tentang SAP dan akuntansi berbasis akrual bagi karyawan dan manajemen, mengembangkan atau mengadopsi sistem informasi akuntansi terintegrasi agar pelaporan lebih cepat dan akurat serta terus melakukan audit berkala dan evaluasi sistem keuangan agar sistem tetap efektif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2014. Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta.
- AICPA. 2002. Statement on Auditing Standards. New York: AICPA
- American Accounting Association (AAA). 1916. Amerika.

JURNAL MANEKSI VOL 14, NO. 01, MARET 2025

- Anik Yuesti, dkk. 2020. Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama. Denpasar: CV Noah Aleitheia.
- Bastian, Indra. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendrianto, Alamsyah, Sakti dan Indrawan, Andri (2022) Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah. Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal, 19 (2). pp. 184-195. ISSN 2614-820X
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Mahmudi. (2019). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Romney, S. & Steinbart, P. J., 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta selatan: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Yuwono, Setyo. (2019). Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- <https://ppmschool.ac.id/akuntansi-sektor-publik>
- <https://www.google.com/search?q=sistem+keuangan>
- https://peraturanpedia.com/provinsi/peraturan-daerah-provinsi-maluku-nomor-2-tahun-2020/#google_vignette
- <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-bank-indonesia-nomor-16-11-pbi-2014/>